

OPTIMALISASI SINERGI ANTARA PEMERINTAH DAN GEREJA DALAM PERENCANAAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN KEAGAMAAN KRISTEN DI KOTA BATAM

Gomgom Purba

Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam
gomgom@st3b.ac.id

Abstract

This study aims to explore and analyze the optimization of synergy between the government and the church in budget planning for Christian religious activities in Batam City. Religious activities play a vital role in character building and maintaining harmony among citizens. While the church serves as a center for moral and social development and the government has a constitutional responsibility to support religious freedom, challenges in creating optimal synergy still exist. The lack of clarity in roles between the government and the church, as well as inadequate coordination mechanisms, hinder collaboration. This research utilizes a qualitative method with a case study approach to gather data through in-depth interviews and document analysis. The findings indicate that effective synergy can be achieved through participatory budget planning involving both parties from the outset, as well as the application of innovations in budgeting schemes and transparency principles. The recommendations produced from this research include establishing a Permanent Consultation Forum between the Government and the Church, creating special budget categories for social-religious activities, and developing technical guidelines for partnership. Through these measures, it is expected that the synergy between the government and the church will provide positive impacts for the multicultural community of Batam City, creating a more harmonious environment and optimizing the quality of life for its residents.

Keywords: synergy, government, church, budget planning, religious activities, Batam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis optimalisasi sinergi antara pemerintah dan gereja dalam perencanaan anggaran untuk kegiatan keagamaan Kristen di Kota Batam. Kegiatan keagamaan mempunyai peran penting dalam membangun karakter masyarakat dan menjaga kerukunan antarwarga. Meskipun gereja berfungsi sebagai pusat pengembangan moral dan sosial, dan pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mendukung kebebasan beragama, tantangan dalam menciptakan sinergi yang optimal masih ada. Ketidakjelasan peran antara pemerintah dan gereja, serta kurangnya mekanisme koordinasi menjadi penghalang dalam kolaborasi ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa sinergi yang efektif dapat dicapai melalui perencanaan anggaran partisipatif yang melibatkan kedua pihak sejak awal, serta penerapan inovasi dalam skema penganggaran dan prinsip transparansi. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini termasuk pembentukan Forum Konsultasi Tetap Pemerintah-Gereja, penyusunan pos anggaran khusus untuk kegiatan sosial-keagamaan, dan pengembangan pedoman teknis untuk kemitraan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan gereja dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Batam yang multikultural, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, dan mengoptimalkan kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci: sinergi, pemerintah, gereja, perencanaan anggaran, kegiatan keagamaan, Batam.

PENDAHULUAN

Kegiatan keagamaan memainkan peranan penting dalam pembentukan karakter masyarakat dan menjaga kerukunan antarwarga. Dalam hal ini, gereja sebagai institusi keagamaan Kristen tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai pusat pengembangan moral dan sosial. Gereja menyediakan wadah bagi umat untuk berinteraksi, berbagi nilai-nilai positif, serta membangun komunitas yang saling mendukung. Contohnya, banyak gereja yang mengadakan program sosial seperti distribusi sembako, layanan kesehatan gratis, dan pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Kegiatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual umat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Ini mencakup dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang dapat menciptakan ketertiban dan perdamaian (Ruhana, 2015).

Dalam konteks ini, pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan keagamaan serta merumuskan kebijakan yang mendukung keberagaman agama. Misalnya, pemerintah dapat menyelenggarakan forum dialog antaragama yang melibatkan berbagai pemuka agama, termasuk pemimpin gereja, untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan kerukunan antarumat beragama. Sinergi antara pemerintah dan gereja menjadi suatu keharusan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. Kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi umat Kristen, tetapi juga bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama mereka. Melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan,

dampak positif bagi masyarakat dapat dimaksimalkan (M. Irfan Riyadi dan Basuki, 2009). Misalnya, kegiatan bersih-bersih lingkungan yang diorganisir oleh gereja dapat melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

Namun, menciptakan sinergi yang optimal tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah mekanisme koordinasi yang belum terstruktur antara pemerintah dan gereja. Dalam banyak kasus, terdapat ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, yang dapat mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaan program. Selain itu, perbedaan pemahaman mengenai regulasi yang ada juga dapat menjadi penghalang. Misalnya, gereja mungkin memiliki interpretasi yang berbeda mengenai izin kegiatan keagamaan dibandingkan dengan pandangan pemerintah, yang dapat menyebabkan kebingungan dan konflik. Kegiatan keagamaan yang dijalankan oleh gereja memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter masyarakat dan memelihara kerukunan hidup berbangsa. Sinergi antara pemerintah dan gereja merupakan langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, terutama di wilayah multikultural seperti Kota Batam.

Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam menciptakan kolaborasi yang efektif, dengan pendekatan yang tepat dan komitmen dari semua pihak, potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami dinamika sinergi antara pemerintah dan gereja, tetapi juga untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Keterbatasan dalam perencanaan anggaran yang partisipatif dan responsif juga menjadi tantangan tersendiri. Seringkali, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan keagamaan tidak mencerminkan kebutuhan riil umat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah dan gereja dalam menentukan prioritas kegiatan yang perlu didanai. Sebagai contoh, jika gereja mengajukan program pendidikan bagi anak-anak, tetapi pemerintah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, maka potensi kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan terabaikan. Tantangan ini semakin kompleks di wilayah dengan karakteristik multikultural seperti Kota Batam. Kota ini merupakan melting pot, di mana berbagai suku, budaya, dan agama hidup berdampingan.

Dalam konteks ini, dukungan terhadap kegiatan keagamaan, termasuk yang dilakukan oleh gereja, harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan sensitivitas terhadap dinamika sosial yang ada. Misalnya, saat merencanakan kegiatan keagamaan, penting bagi pemerintah untuk melibatkan perwakilan dari berbagai agama dan latar belakang budaya, sehingga setiap suara dapat didengar dan dipertimbangkan. Perencanaan anggaran yang mendukung kegiatan keagamaan di Batam tidak hanya bersifat teknis-finansial, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai kolaborasi dan keberpihakan pada kemaslahatan bersama (Fadjar, 2005).

Dalam hal ini, pemerintah dapat mengembangkan model anggaran partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, sehingga kebutuhan dan aspirasi mereka dapat terakomodasi dengan baik. Sebagai contoh, pemerintah dapat mengadakan forum diskusi yang melibatkan gereja dan komunitas lainnya untuk merumuskan prioritas program yang akan didanai, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam sinergi antara pemerintah Kota Batam dan gereja-gereja Kristen dalam perencanaan kegiatan keagamaan. Dalam hal ini, potensi yang dimaksud meliputi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh gereja, seperti jaringan relawan, fasilitas, dan pengalaman dalam melaksanakan program sosial.

Di sisi lain, tantangan yang ada perlu dianalisis lebih dalam untuk menemukan solusi yang tepat. Dengan fokus pada aspek perencanaan anggaran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan penguatan peran konstruktif gereja dalam masyarakat multikultural Kota Batam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat disusun rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan gereja dalam rangka mengoptimalkan perencanaan anggaran yang mendukung sinergi antara keduanya. Rekomendasi tersebut dapat mencakup pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih baik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar komunikasi dan kolaborasi. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan gereja tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi umat Kristen, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kota Batam, menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika sinergi antara pemerintah Kota Batam dan gereja-gereja Kristen dalam perencanaan anggaran kegiatan keagamaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari pemerintah (pejabat

dinas terkait) dan perwakilan gereja, serta melalui analisis dokumen seperti APBD, program kerja gereja, dan peraturan daerah. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih partisipan yang memahami langsung proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran terkait kegiatan keagamaan (Suharsimi Arikunto, 2013).

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan teknik analisis tematik, meliputi proses pengkodean, identifikasi pola, dan penyusunan tema berdasarkan data yang terkumpul. Keabsahan temuan dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, serta member check kepada informan. Dengan metode ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman kontekstual yang komprehensif untuk menjawab tujuan penelitian dan merumuskan rekomendasi yang aplikatif.

Definisi dan Konsep Sinergi

Secara etimologis, kata "sinergi" berasal dari bahasa Yunani *synergia*, yang berarti "bekerja sama" (*syn* = bersama, *ergon* = kerja). Dalam konteks kontemporer, sinergi didefinisikan sebagai suatu bentuk kolaborasi atau interaksi antara dua atau lebih entitas (individu, kelompok, organisasi, atau sektor) yang menghasilkan efek atau pencapaian keseluruhan yang lebih besar daripada jumlah kontribusi masing-masing bagian jika bekerja secara terpisah. Prinsip ini sering dirumuskan sebagai "1 + 1 = 3" atau "*the whole is greater than the sum of its parts*," yang menekankan pada terciptanya nilai tambah (*added value*) dari kerja sama tersebut. Konsep sinergi melampaui sekadar kerja sama biasa atau koordinasi administratif. Ia merupakan suatu interaksi yang dinamis dan saling memperkuat, di mana masing-masing pihak menyumbangkan sumber daya, keahlian, perspektif, atau legitimasi yang unik dan komplementer (Kaloh, 2003).

Dalam konteks pemerintahan dan organisasi keagamaan, sinergi muncul ketika pemerintah membawa otoritas

kebijakan, akses anggaran, dan jangkauan institusional, sementara gereja menyumbangkan jaringan sosial yang kuat, kepercayaan komunitas, fleksibilitas pelayanan, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan rohani dan sosial umat. Kombinasi ini menciptakan kapasitas baru yang lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama. Sinergi dapat dipahami melalui beberapa dimensi kunci (Faisal Ismail, 2014). Pertama, dimensi strategis, yakni keselarasan visi dan tujuan jangka panjang antara para pihak. Kedua, dimensi operasional, yang mencakup pembagian peran, integrasi prosedur, dan koordinasi dalam pelaksanaan program. Ketiga, dimensi sumber daya, berupa penggabungan atau sharing aset seperti anggaran, fasilitas, tenaga, dan informasi. Keempat, dimensi relasional, yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, komunikasi terbuka, saling menghormati, dan komitmen bersama (Mawa, 2020).

Keberhasilan sinergi sangat bergantung pada keseimbangan dan kekuatan keempat dimensi ini. Dalam ranah publik, sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan (seperti gereja) seringkali dimaknai sebagai bentuk kemitraan strategis. Kemitraan ini tidak hanya bersifat transaksional (misalnya pemberian hibah), tetapi juga transformasional, yang bertujuan untuk memberdayakan komunitas dan memecahkan masalah sosial yang kompleks. Sinergi model ini memungkinkan pemerintah mencapai sasarannya dalam membangun ketertiban, perdamaian sosial, dan kesejahteraan dengan lebih efisien dan tepat sasaran, sementara gereja dapat memperluas dampak pelayanannya dan memperkuat peran sosialnya dengan dukungan legitimasi dan infrastruktur dari negara. Mewujudkan sinergi yang efektif memerlukan prasyarat tertentu.

Di antaranya adalah komitmen politik dan kelembagaan yang jelas, kerangka hukum dan kebijakan yang

mendukung, serta mekanisme kelembagaan untuk dialog dan koordinasi yang berkelanjutan. Tantangan yang sering muncul meliputi potensi ketegangan antara otonomi organisasi keagamaan dan akuntabilitas birokrasi pemerintah, kekhawatiran akan politisasi agama atau instrumentalisasi negara, serta perbedaan budaya kerja dan sistem pengambilan keputusan antara kedua sektor. Tantangan-tantangan ini memerlukan negosiasi dan desain tata kelola kemitraan yang cermat. Dalam perkembangan teori tata kelola modern, sinergi antara pemerintah dan gereja dapat dipandang sebagai bagian dari model tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) atau yang melibatkan multi-pemangku kepentingan. Dalam kerangka ini, sinergi bukan lagi hubungan dua arah yang tertutup, tetapi sebuah ekosistem terbuka di mana pemerintah (akademisi/ilmuwan), komunitas (gereja), sektor swasta, dan media saling terkait untuk menciptakan inovasi sosial. Konsep ini menegaskan bahwa sinergi optimal tercapai ketika didukung oleh ekosistem yang luas, transparan, dan inklusif, di mana setiap aktor dapat berkontribusi sesuai kapasitas intinya untuk kemaslahatan bersama yang berkelanjutan (Aldrin Purnomo and Yudhy Sanjaya, 2020).

Definisi dan Filosofi Dasar Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah proses sistematis dan prospektif dalam menyusun alokasi sumber daya keuangan untuk periode waktu tertentu, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya bersifat teknis-akuntansi, tetapi merupakan manifestasi dari prioritas politik, kebijakan publik, dan komitmen suatu entitas terhadap masa depan. Dalam konteks pemerintahan, anggaran adalah dokumen politik dan instrumen kebijakan utama yang mencerminkan pilihan strategis tentang apa yang didanai,

seberapa besar, dan untuk kepentingan siapa. Filosofi dasarnya adalah mengubah tujuan abstrak menjadi program aksi konkret yang didanai, sehingga "uang mengikuti kebijakan".

Beberapa prinsip fundamental mendasari perencanaan anggaran yang baik dan kredibel. Pertama, prinsip keterbukaan (transparansi), yang menuntut proses dan dokumen anggaran dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh publik. Kedua, prinsip akuntabilitas, di mana para pengelola anggaran harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya secara prosedural dan substantif terhadap hasil yang dicapai. Ketiga, prinsip partisipasi, yang mensyaratkan keterlibatan pemangku kepentingan yang terdampak dalam proses perencanaan, sehingga anggaran lebih responsif terhadap kebutuhan nyata (Zainal Abidin Bagir et al., 2011).

Prinsip ini merupakan kunci untuk membangun kepemilikan (*ownership*) dan legitimasi publik. Prinsip-prinsip lain yang tak kalah penting adalah prinsip kesinambungan fiskal (keberlanjutan), yang menjamin bahwa komitmen anggaran tidak melampaui kemampuan keuangan jangka panjang. Selain itu, prinsip nilai uang (*value for money*), yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam setiap pengeluaran. Terakhir, prinsip keadilan, baik vertikal (pemberian lebih kepada yang lebih membutuhkan) maupun horizontal (perlakuan setara terhadap kondisi yang setara).

Dalam konteks kegiatan keagamaan di masyarakat multikultural, prinsip keadilan ini menjadi sangat krusial. Dalam konteks mendukung kegiatan keagamaan, anggaran memiliki peran fungsional yang multi-dimensional (Yakub B. Susabda, 1981). Pertama, peran fasilitatif, di mana anggaran digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana fisik yang menunjang ibadah dan aktivitas komunitas, seperti perawatan rumah ibadah, tempat parkir,

atau ruang pertemuan multifungsi. Kedua, peran pemberdayaan, yakni alokasi dana untuk program-program yang meningkatkan kapasitas umat beragama, seperti pelatihan, pendidikan karakter, atau keterampilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Ketiga, peran simbolik dan pengakuan, di mana penganggaran yang dialokasikan secara proporsional dan adil merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan kontribusi suatu komunitas agama dalam kehidupan berbangsa.

Lebih strategis lagi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat perekat sinergi (*glue of collaboration*) antara pemerintah dan institusi keagamaan. Melalui mekanisme seperti hibah, bansos terafiliasi, atau pembiayaan bersama (*co-funding*) untuk program tertentu, anggaran menjadi medium resmi yang melembagakan kerja sama. Selain itu, anggaran berperan dalam penguatan kohesi dan kerukunan sosial. Ketika dialokasikan untuk kegiatan lintas iman, dialog antaragama, atau proyek pelayanan masyarakat yang dilakukan bersama oleh berbagai kelompok agama, anggaran menjadi investasi konkret bagi perdamaian dan integrasi sosial, khususnya di daerah multikultural seperti Batam. Namun, penganggaran untuk kegiatan keagamaan kerap menghadapi tantangan kompleks. Di antaranya adalah risiko politisasi dan diskriminasi, di mana alokasi dapat dinilai tidak adil oleh kelompok lain, serta tantangan akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam penyaluran melalui pihak ketiga seperti organisasi keagamaan (Erman Sepniagus Saragih, 2019).

Oleh karena itu, optimalisasi perencanaan anggaran dalam konteks ini memerlukan pendekatan khusus, yakni perencanaan anggaran yang inklusif dan berbasis bukti (*evidence-based*). Hal ini dapat diwujudkan melalui forum perencanaan partisipatif yang melibatkan perwakilan berbagai pemangku kepentingan keagamaan, disertai dengan

sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar mencapai tujuannya: membangun masyarakat yang religius, rukun, dan sejahtera. Dengan demikian, anggaran tidak lagi sekadar belanja, tetapi transformasi nilai menjadi aksi kolektif untuk kebaikan bersama.

Kota Batam sebagai Miniatur Indonesia yang Multikultural

Kota Batam merupakan mikrokosmos yang merefleksikan keberagaman Indonesia. Sebagai pusat ekonomi dan pintu gerbang internasional, Batam menarik pendatang dari seluruh penjuru Nusantara, membentuk mosaik suku, budaya, dan agama yang kaya. Komposisi penduduknya yang heterogen menempatkan Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu hidup dalam jarak yang berdekatan. Dinamika kota yang cepat dan sifatnya yang metropolitan menciptakan ruang sosial di mana interaksi antarkelompok agama menjadi keniscayaan sekaligus tantangan dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis. Komunitas Kristen (Protestan) di Batam merupakan bagian integral dari populasi yang signifikan dan sangat beragam secara internal. Jemaat gereja di Batam berasal dari berbagai latar belakang etnis, terutama Batak, Minahasa, NTT, dan Jawa, yang membawa serta tradisi dan ekspresi ibadah yang khas. Keragaman ini tercermin dalam banyaknya denominasi gereja yang hadir, dari gereja-gereja historis hingga gereja karismatik dan independen.

Sebagai komunitas yang mayoritas adalah migran, gereja-gereja di Batam seringkali berfungsi sebagai "rumah kedua" yang memberikan rasa memiliki, dukungan sosial, dan jaringan solidaritas bagi para pendatang dalam mengarungi kehidupan urban. Peran gereja di Batam melampaui fungsi ritual dan spiritual semata. Di tengah

masyarakat urban yang impersonal dan penuh persaingan, gereja berperan sebagai *anchor community* (komunitas penjangkaran) yang menawarkan stabilitas dan nilai-nilai. Secara sosial, gereja aktif dalam pelayanan diakonia melalui program bantuan bagi jemaat dan warga sekitar yang membutuhkan, pendidikan melalui sekolah dan PAUD, serta pelayanan kesehatan. Secara kultural, gereja menjadi ruang pelestarian dan negosiasi identitas etnis dan religius bagi para migran.

Dalam konteks kota, gereja adalah aktor masyarakat sipil yang potensial untuk mendorong isu-isu moral dan kesejahteraan bersama. Hubungan antaragama di Batam umumnya ditandai oleh pola ko-eksistensi damai dan interaksi fungsional. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antarwarga berbeda agama cenderung bersifat baik, saling menghormati, dan terjalin dalam ranah ekonomi, bertetangga, dan pertemanan. Interaksi ini sering kali bersifat pragmatis, didorong oleh kebutuhan hidup di kota kosmopolitan. Namun, di tingkat elite dan kelembagaan, telah berkembang pula upaya-upaya lebih proaktif untuk membangun hubungan yang lebih kolaboratif, seperti melalui forum-forum dialog antaragama yang difasilitasi pemerintah maupun inisiatif masyarakat. Relasi ini dibingkai oleh kesadaran bersama akan pentingnya menjaga stabilitas sosial bagi keberlangsungan ekonomi dan kehidupan kota. Potensi besar Kota Batam terletak pada kemampuannya menjadikan keberagaman sebagai modal sosial dan daya tarik. Praktik toleransi sehari-hari yang sudah mengakar kuat adalah fondasi yang berharga. Namun, kota ini juga tidak kebal terhadap kerentanan (Ramona Vera Amiman, 2018).

Dinamika sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, dan persaingan sumber daya dapat memicu ketegangan yang dipolitisasi dengan sentimen identitas keagamaan. Selain itu, arus

informasi dan paham radikal dari luar dapat memengaruhi kelompok-kelompok kecil. Oleh karena itu, ko-eksistensi pasif perlu terus ditingkatkan menuju ko-eksistensi aktif, di mana berbagai kelompok agama secara sadar bekerja sama membangun masa depan kota. Dalam kerangka ini, gereja dipanggil untuk memainkan peran sebagai agen sinergi dan pemelihara harmoni. Peran ini dapat diwujudkan dengan: pertama, memperkuat internal jemaat dengan pemahaman iman yang inklusif dan cinta damai; kedua, membuka ruang dialog dan kerja sama nyata dengan pemeluk agama lain dalam proyek-proyek kemanusiaan dan sosial; dan ketiga, menjadi mitra kritis-konstruktif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dan menjaga kerukunan. Dengan memanfaatkan modal sosial, jaringan, dan kapasitas organisasinya, gereja dapat menjadi salah satu pilar utama yang mengukuhkan Batam bukan hanya sebagai kota industri, tetapi juga sebagai kota peradaban yang menghargai perbedaan.

Bentuk-Bentuk Dukungan Pemerintah terhadap Kegiatan Gereja

Pemerintah Kota Batam, dalam rangka menjalankan amanat konstitusi dan kebijakan kerukunan umat beragama, memberikan dukungan terhadap kegiatan gereja dalam beberapa bentuk. Dukungan ini dapat bersifat administratif, seperti penerbitan izin kegiatan dan penggunaan fasilitas umum; finansial, melalui alokasi anggaran khusus untuk kegiatan sosial-keagamaan atau bantuan hibah; serta politis, dengan melibatkan perwakilan gereja dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan. Dukungan ini bertujuan untuk memfasilitasi peran sosial gereja dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka pembangunan kota yang inklusif. Namun, implementasi dukungan ini tidak jarang menjadi titik awal dari kompleksitas tantangan sinergi yang lebih dalam. Tantangan paling mendasar dalam

sinergi terletak pada perbedaan paradigma dan kerangka acuan kerja antara pemerintah dan gereja (Hasiholan, A. M., & Siahaan, 2024).

Pemerintah beroperasi dalam logika birokrasi, yang menekankan pada hierarki, peraturan baku, akuntabilitas keuangan formal, dan pencapaian indikator kinerja yang terukur. Sementara itu, gereja seringkali bergerak dalam logika pelayanan dan komunitas, yang lebih mengutamakan respons terhadap panggilan iman, fleksibilitas, relasi personal, dan dampak transformatif yang tidak selalu mudah dikuantifikasi. Perbedaan kerangka acuan ini dapat menimbulkan kesenjangan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan "keberhasilan" sebuah program kolaborasi. Tantangan operasional yang paling terasa adalah kendala komunikasi dan koordinasi yang seringkali tidak terstruktur dan bersifat ad-hoc. Komunikasi cenderung terjadi hanya pada momen-momen tertentu, seperti ketika memerlukan izin atau mengajukan proposal dana, bukan sebagai dialog berkelanjutan. Tidak adanya kanal atau forum kelembagaan yang tetap dan berwenang untuk koordinasi antara dinas pemerintah dengan majelis gereja menyebabkan informasi tidak terdistribusi merata, proses menjadi lambat, dan munculnya mispersepsi. Gereja mungkin merasa prosedur birokrasi berbelit, sementara pemerintah dapat menganggap gereja kurang disiplin dalam administrasi (Bolung, 2023).

Perbedaan Visi dan Misi dalam Memaknai "Dukungan" dan "Kegiatan"

Perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan gereja sangat tampak dalam cara masing-masing memaknai "dukungan" dan "kegiatan keagamaan". Pemerintah, dengan kerangka kerja birokratis dan akuntabilitas publik, cenderung memprioritaskan dukungan pada kegiatan yang berdampak luas, terukur, dan selaras dengan program

pembangunan nasional atau daerah, seperti kampanye kesehatan, kebersihan lingkungan, atau bantuan sosial yang bersifat universal. Sementara itu, bagi gereja, kegiatan keagamaan tidak hanya mencakup aspek pelayanan publik, tetapi juga aktivitas internal yang fundamental seperti pembinaan rohani, pemuridan, ibadah rutin, dan pendalaman iman yang meskipun bersifat lebih eksklusif bagi jemaat, dipandang sebagai tulang punggung keberlanjutan spiritual dan moral masyarakat (Muhammad Qasim, 2020).

Perbedaan perspektif ini seringkali menyebabkan proposal kegiatan gereja tidak memenuhi "kriteria teknis" atau "selera" anggaran pemerintah, sehingga hanya didanai sebagian atau bahkan ditolak karena dianggap kurang memiliki dampak publik yang langsung terlihat. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya keragaman internal tubuh gereja sendiri. Gereja di Kota Batam terdiri dari berbagai denominasi dan aras (tingkatan) pelayanan mulai dari sinode atau pusat, klasis atau wilayah, hingga jemaat lokal yang masing-masing memiliki agenda, kebutuhan, dan mekanisme penganggaran internal yang berbeda-beda. Sinode mungkin fokus pada program pembinaan teologi dan pelatihan pastoral yang berskala regional, klasis mengkoordinasikan kegiatan antargereja dalam satu wilayah, sedangkan jemaat lokal lebih memprioritaskan kegiatan rutin seperti ibadah minggu, sekolah minggu, dan pelayanan diakonia langsung.

Keragaman aras gereja ini sering tidak terakomodasi dalam alokasi anggaran pemerintah, yang umumnya dirancang dengan skema yang seragam dan cenderung berfokus pada kegiatan "seremonial" atau "proyek fisik" yang mudah diadministrasikan, bukan pada proses pembinaan berkelanjutan yang justru menjadi inti pelayanan gereja. Di sisi lain, proses perencanaan dan penganggaran pemerintah, khususnya penyusunan APBD bersifat sangat

birokratis, tersentralisasi, dan kurang menyediakan ruang partisipasi yang memadai bagi organisasi keagamaan, termasuk gereja.

Gereja, terutama di tingkat lokal, seringkali tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang siklus perencanaan anggaran daerah, mekanisme pengajuan proposal, atau bahkan kriteria teknis yang harus dipenuhi. Akibatnya, banyak kegiatan strategis gereja, baik yang bersifat internal seperti retreat rohani maupun eksternal seperti bakti sosial tidak tertampung dalam dokumen perencanaan sejak awal. Alokasi anggaran yang ada pun cenderung bersifat reaktif dan insidental, misalnya hanya diberikan untuk peringatan hari besar keagamaan atau perbaikan fasilitas fisik, bukan sebagai bagian dari perencanaan strategis jangka panjang yang melibatkan gereja sebagai mitra. Ketidakselarasan antara agenda multi-aras gereja dan mekanisme anggaran pemerintah ini tidak hanya menyebabkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan dana, tetapi juga berpotensi memicu ketimpangan di antara gereja-gereja itu sendiri.

Gereja yang memiliki akses politik atau kemampuan administratif yang lebih baik mungkin lebih mudah mendapatkan dukungan, sementara gereja kecil di akar rumput yang justru paling dekat dengan kebutuhan riil masyarakat kesulitan mengakses anggaran karena tidak mampu memenuhi persyaratan birokratis yang kompleks. Hal ini pada gilirannya memperlemah potensi sinergi, karena kolaborasi seharusnya membangun kapasitas semua pihak, bukan hanya yang sudah mapan. Oleh karena itu, membangun sinergi yang optimal bukanlah dengan menyamaratakan visi atau menghilangkan perbedaan, melainkan dengan menciptakan mekanisme anggaran yang lebih luwes dan responsif terhadap keragaman agenda gereja (Watofa, A. J. D., Marini, R. R., & Santoso, 2023).

Pemerintah perlu merancang skema alokasi yang tidak hanya berfokus pada kegiatan "fisik" atau "seremonial", tetapi juga mengakui pentingnya kegiatan pembinaan dan penguatan kapasitas internal gereja sebagai investasi sosial jangka panjang. Misalnya, dengan menyediakan pos anggaran khusus untuk program penguatan masyarakat berbasis keagamaan yang dapat diakses oleh berbagai aras gereja mulai dari tingkat sinode untuk program pelatihan, hingga tingkat jemaat untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi umat. Sinergi anggaran yang inklusif mensyaratkan platform perencanaan partisipatif yang melibatkan perwakilan dari berbagai aras gereja sejak awal siklus penganggaran. Melalui forum tersebut, pemerintah dapat memahami peta kebutuhan dan agenda gereja yang berlapis, sementara gereja dapat memperoleh literasi tentang prosedur dan prioritas anggaran daerah.

Dengan pendekatan ini, dukungan pemerintah tidak lagi dipandang sebagai bantuan sepihak, tetapi sebagai investasi kolaboratif dalam membangun modal sosial dan spiritual Kota Batam di mana setiap aras gereja, dengan keunikan agendanya, dapat berkontribusi secara optimal bagi terciptanya masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga kuat secara moral dan kohesif secara sosial.

Mengidentifikasi Landasan Sinergi sebagai Peluang Bersama

Peluang utama untuk meningkatkan sinergi terletak pada kesadaran bahwa baik pemerintah maupun gereja sama-sama memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Batam, meskipun dengan pendekatan dan mandat yang berbeda. Peluang ini dapat diwujudkan dengan mentransformasikan hubungan yang selama ini bersifat transaksional (berbasis izin dan proposal dana) menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada hasil. Langkah awal yang krusial

adalah mengidentifikasi area-area konkret di mana sumber daya pemerintah (otoritas kebijakan, anggaran, infrastruktur) dan kapital sosial gereja (kepercayaan masyarakat, jaringan relawan, pemahaman lokal) dapat saling melengkapi secara maksimal, seperti dalam penanganan isu sosial, pendidikan karakter, dan penguatan ketahanan keluarga. Untuk mengkatalisasi peluang tersebut, diperlukan suatu forum komunikasi yang diinstitusionalkan dan berkelanjutan (Viarel Elsievana Augesthine et al., 2022).

Forum ini harus bersifat resmi, memiliki agenda tetap, dan melibatkan perwakilan dengan kewenangan mengambil keputusan dari kedua belah pihak, misalnya dari Dinas Sosial atau Kesra Pemerintah Kota dengan Majelis atau Asosiasi Gereja-Gereja di Batam. Forum ini berfungsi bukan hanya sebagai tempat koordinasi proyek, tetapi lebih sebagai wahana dialog strategis untuk berbagi informasi perencanaan jangka menengah, menyelaraskan prioritas, dan membangun kepercayaan secara personal. Keberadaannya akan mengubah pola komunikasi dari reaktif dan sporadis menjadi proaktif dan terstruktur. Hasil konkret dari forum komunikasi harus dituangkan dalam program kolaboratif dengan desain bersama.

Program ini harus melampaui skema "pemerintah sebagai pemberi dana, gereja sebagai pelaksana". Sebaliknya, kedua pihak harus terlibat sejak fase perencanaan, penetapan indikator keberhasilan, hingga evaluasi. Contoh program yang potensial adalah "Keluarga Tangguh Batam" yang menggabungkan pendampingan spiritual dan konseling dari gereja dengan pelatihan keterampilan dan akses bantuan sosial dari pemerintah, atau "Sekolah Orang Tua" untuk mencegah kekerasan pada anak dan pernikahan dini. Desain bersama memastikan program relevan dengan kebutuhan dasar

dan akuntabel bagi kedua mitra. Peluang peningkatan sinergi juga terbuka lebar dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pemerintah dapat mengembangkan platform digital terpadu yang memudahkan gereja untuk mengakses informasi terkait peraturan, kalender perencanaan anggaran, dan mekanisme pengajuan proposal. Platform ini juga dapat berfungsi sebagai sistem pelaporan dan pemantauan program kolaboratif secara transparan. Dengan dukungan data, baik pemerintah maupun gereja dapat melakukan perencanaan yang lebih berbasis bukti, mengidentifikasi lokasi sasaran yang paling membutuhkan, dan mengukur dampak intervensi mereka secara lebih objektif, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kerja sama. Peluang penting lainnya adalah melalui inisiatif pembangunan kapasitas dan literasi bersama. Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus gereja mengenai tata kelola keuangan organisasi nirlaba, prosedur pengadaan barang/jasa yang sederhana, dan mekanisme akuntabilitas publik. Sebaliknya, gereja dapat berbagi wawasan kepada aparat pemerintah mengenai dinamika sosial komunitas dan pendekatan kultural dalam pelayanan.

Program pertukaran pengetahuan ini akan menyamakan persepsi, mengurangi kesenjangan pemahaman birokrasi, dan memperkuat kapasitas kelembagaan kedua belah pihak untuk bermitra secara setara dan profesional. Pada akhirnya, optimalisasi peluang ini akan mengantarkan sinergi pemerintah-gereja menjadi sebuah model tata kelola inklusif yang khas Batam. Forum komunikasi yang hidup dan program kolaboratif yang berhasil tidak hanya menyelesaikan masalah sosial, tetapi juga menjadi simbol nyata dari kehidupan beragama yang produktif dan harmonis di kota multikultural. Sinergi ini dapat menjadi percontohan bagi kerja sama

dengan kelompok agama lain, memperkuat citra Batam sebagai kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga matang secara sosial. Dengan demikian, kerja sama ini bukan lagi sekadar proyek, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun ketahanan dan karakter masyarakat Batam.

Integrasi antara Penetapan Prioritas dan Prinsip Transparansi

Keterlibatan gereja dalam proses perencanaan anggaran bukan sekadar syarat formal, melainkan fondasi strategis untuk menciptakan sinergi yang efektif. Keterlibatan ini harus dimulai pada tahap yang sangat awal, yakni pada fase penyusunan prioritas dan rencana kerja pemerintah daerah (misalnya dalam forum Musrenbang). Dengan melibatkan perwakilan gereja yang memahami dinamika umat dan kebutuhan riil di tingkat akar rumput, pemerintah dapat memperoleh data sosial yang kualitatif dan kontekstual. Input ini menjadi dasar vital untuk menyusun sebuah model perencanaan anggaran partisipatif yang responsif, sehingga anggaran tidak lagi didasarkan pada asumsi atau kepentingan proyek semata, tetapi pada kebutuhan konkret masyarakat yang dilayani gereja (Eddy Paimoen, 1999).

Untuk mengakomodasi keragaman internal gereja, model pendekatan partisipatif perlu dirancang secara inklusif dan berjenjang. Ini berarti mekanisme konsultasi tidak hanya melibatkan satu atau dua tokoh, tetapi juga perwakilan dari berbagai aras (tingkat sinode, klasis/wilayah, dan jemaat lokal) serta latar belakang denominasi. Model ini dapat berupa forum konsultasi multi-stakeholder keagamaan yang diselenggarakan secara berkala oleh pemerintah daerah. Di forum inilah proses penetapan prioritas kegiatan keagamaan dilakukan secara bersama-sama, dengan menggunakan kriteria yang disepakati seperti urgensi kebutuhan, potensi

dampak sosial, keselarasan dengan program pembangunan daerah, dan keberlanjutan.

Prioritas yang dihasilkan menjadi acuan bersama untuk penyusunan anggaran. Transparansi menjadi prinsip kunci yang harus menyelimuti seluruh proses, mulai dari penetapan prioritas hingga pelaporan akhir. Setelah prioritas kegiatan disepakati dalam forum partisipatif, pemerintah perlu secara terbuka mempublikasikan daftar dan alasan prioritas tersebut beserta pagu indikatif anggarannya melalui saluran yang mudah diakses gereja dan publik. Model penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dapat diterapkan, di mana setiap alokasi dana untuk kegiatan keagamaan harus jelas kaitannya dengan *output* dan *outcome* yang telah disepakati sebelumnya. Transparansi pada tahap ini membangun kepercayaan dan mencegah mispersepsi.

Akuntabilitas tidak boleh hanya dibebankan pada gereja sebagai penerima dana, tetapi harus dibangun sebagai sistem akuntabilitas bersama (*mutual accountability*). Dalam model yang efektif, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pedoman dan pelatihan administrasi yang jelas dan sederhana, sementara gereja bertanggung jawab untuk melaporkan penggunaan dana secara tertib dan sesuai tujuan. Lebih dari itu, akuntabilitas juga mencakup aspek substantif, yaitu pertanggungjawaban atas dampak kegiatan. Evaluasi bersama terhadap pencapaian *outcome* yang telah ditetapkan perlu dilakukan, melibatkan perwakilan pemerintah, gereja, dan bahkan masyarakat penerima manfaat.

Akuntabilitas model ini mengubah hubungan menjadi kemitraan yang setara. Pemanfaatan teknologi digital dapat memperkuat sekaligus mempermudah penerapan model perencanaan partisipatif yang transparan. Pemerintah dapat mengembangkan platform online partisipatif yang memungkinkan gereja di

berbagai tingkatan untuk mengusulkan kegiatan, memberi masukan pada draf prioritas, dan memantau status usulan serta realisasi anggaran secara real-time. Platform yang sama juga dapat digunakan untuk pengumpulan laporan pertanggungjawaban gereja secara digital, yang kemudian dapat ditampilkan secara terbuka (dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan data tertentu).

Teknologi ini mengurangi hambatan birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan alat bukti transparansi yang dapat diakses oleh semua pihak. Kombinasi dari keterlibatan awal yang berjenjang, pendekatan partisipatif dalam menetapkan prioritas, serta transparansi dan akuntabilitas yang terjaga akan melahirkan sebuah model perencanaan anggaran yang efektif dan sinergis. Model ini bukanlah proyek sekali waktu, melainkan siklus berkelanjutan yang menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan Kota Batam. Keberhasilannya diukur tidak hanya dari tersalukannya anggaran, tetapi lebih dari pada meningkatnya kualitas program keagamaan yang berdampak sosial nyata, menguatnya kepercayaan antara pemerintah dan gereja, serta terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih inklusif dan akuntabel. Dengan model ini, anggaran untuk kegiatan keagamaan benar-benar berubah dari instrumen belanja menjadi instrumen investasi sosial yang strategis.

Inovasi Perencanaan Anggaran dengan Skema Anggaran Responsif Kemitraan

Strategi penguatan kemitraan antara pemerintah dan gereja harus dimulai dengan penyusunan kesepakatan bersama (*memorandum of understanding/MoU*) yang formal namun fleksibel. Dokumen ini bukan sekadar administratif, melainkan deklarasi komitmen yang menjabarkan prinsip dasar kemitraan, seperti tujuan bersama, ruang lingkup kerja sama, hak dan

kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian masalah. Kesepakatan ini menjadi pijakan strategis yang mengubah hubungan dari pola donor-penerima menjadi kemitraan strategis yang setara. Di dalamnya, dapat diatur kerangka untuk inovasi perencanaan anggaran dan skema penggalangan dana bersama, sehingga kolaborasi memiliki dasar hukum dan operasional yang jelas. Inovasi dalam perencanaan anggaran merupakan strategi kunci untuk menerjemahkan kesepakatan menjadi aksi nyata.

Pemerintah dapat mengembangkan skema "Anggaran Responsif Kemitraan", yaitu alokasi khusus dalam APBD yang dirancang secara fleksibel untuk mendanai program kolaboratif hasil rembuk bersama dengan gereja. Skema ini memungkinkan penggunaan metode perencanaan yang lebih adaptif, seperti rolling budget untuk program berkelanjutan atau block grant tematik yang fokus pada isu spesifik (seperti ketahanan keluarga atau pelayanan lansia). Inovasi ini memastikan anggaran tidak kaku dan mampu merespon dinamika kebutuhan masyarakat secara cepat. Untuk memperkuat keberlanjutan dan rasa kepemilikan bersama, strategi kemitraan harus mencakup program penggalangan dana bersama (*co-funding*). Dalam model ini, pemerintah dan gereja tidak hanya berbagi tanggung jawab pelaksanaan, tetapi juga kontribusi sumber daya keuangan.

Pemerintah dapat menyediakan dana pendamping (*matching fund*) yang akan dikeluarkan sebanding dengan dana yang berhasil dihimpun gereja dari jemaat atau jejaringnya. Program ini bukan hanya memperbesar kapasitas finansial program, tetapi juga menjadi simbol nyata komitmen bersama dan meningkatkan akuntabilitas publik, sekaligus menjaga otonomi gereja dalam pengelolaan sebagian sumber dayanya. Strategi penguatan harus didukung oleh inovasi

teknologi yang mempermudah seluruh proses. Pengembangan platform kemitraan digital terintegrasi dapat menjadi tulang punggung untuk koordinasi, mulai dari perencanaan partisipatif, pelaporan penggunaan dana inovatif, hingga pengelolaan penggalangan dana bersama. Platform ini memungkinkan transparansi real-time, di mana semua pihak dapat memantau alur dana, progres program, dan pencapaian target. Teknologi ini juga memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien, mengurangi biaya transaksi kemitraan, dan menjadi alat untuk membangun kepercayaan publik terhadap kolaborasi yang dilakukan. Strategi yang berkelanjutan harus mencakup komitmen bersama untuk penguatan kapasitas kelembagaan.

Pemerintah dapat memberikan pendampingan teknis kepada gereja dalam hal administrasi keuangan, penyusunan proposal, dan monitoring-evaluasi program, sehingga gereja mampu memenuhi standar akuntabilitas dalam skema pendanaan inovatif. Sebaliknya, gereja dapat membagikan keahliannya dalam pendekatan komunitas dan mobilisasi sosial kepada aparat pemerintah. Program pertukaran pengetahuan ini akan memperkuat fondasi kemitraan, membuat penyusunan kesepakatan selanjutnya lebih matang, dan memastikan inovasi anggaran serta penggalangan dana dijalankan secara profesional. Strategi penguatan kemitraan harus dilihat sebagai proses dinamis yang terus dievaluasi dan disempurnakan. Kesepakatan bersama perlu direview secara berkala berdasarkan hasil evaluasi program kolaboratif. Inovasi dalam perencanaan anggaran dan model penggalangan dana harus diuji dan disesuaikan dengan tantangan yang muncul. Dengan menciptakan siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan revisi yang partisipatif, kemitraan akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada titik ini, sinergi pemerintah dan

gereja tidak lagi sebagai proyek, melainkan telah menjadi sistem tata kelola kolaboratif yang hidup, resilent, dan menjadi model bagi pembangunan sosial inklusif di Kota Batam.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa upaya membangun sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan gereja-gereja Kristen dalam perencanaan anggaran kegiatan keagamaan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Perbedaan paradigma menjadi titik kritis: pemerintah beroperasi dalam logika birokrasi dengan penekanan pada indikator kinerja yang terukur dan dampak publik luas, sementara gereja bergerak atas dasar panggilan pelayanan dengan fokus pada pembinaan internal jemaat dan dampak transformatif spiritual. Perbedaan ini diperparah oleh mekanisme komunikasi dan koordinasi yang sporadis, serta struktur perencanaan anggaran (APBD) yang kaku, sentralistik, dan tidak menyediakan ruang partisipasi yang memadai bagi organisasi keagamaan. Akibatnya, alokasi anggaran yang ada cenderung bersifat reaktif, insidental, dan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan riil serta keragaman agenda dari berbagai aras pelayanan gereja. Namun, penelitian juga mengidentifikasi potensi sinergi yang signifikan.

Gereja memiliki modal sosial yang kuat berupa kepercayaan masyarakat, jaringan relawan, dan pemahaman kontekstual yang mendalam, sementara pemerintah memiliki otoritas kebijakan, akses anggaran, dan jangkauan institusional. Temuan kunci menunjukkan bahwa model yang efektif untuk menjembatani perbedaan ini adalah melalui perencanaan anggaran partisipatif dan inklusif. Model ini memerlukan pembentukan forum komunikasi resmi yang melibatkan perwakilan multi-aras gereja sejak tahap awal penyusunan prioritas, penerapan inovasi dalam skema

penganggaran (seperti *block grant* tematik atau *matching fund*), serta komitmen bersama pada prinsip transparansi dan akuntabilitas timbal balik. Penguatan sinergi ini bukan hanya akan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di Kota Batam yang multikultural. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa implikasi kebijakan yang konkret. Pertama, Pemerintah Kota Batam perlu menginisiasi dan menginstitusionalkan Forum Konsultasi Tetap Pemerintah-Gereja.

Forum ini harus berfungsi sebagai wahana dialog strategis berkala untuk menyelaraskan perencanaan, membahas usulan kegiatan, dan mengevaluasi program kolaboratif, dengan keanggotaan yang mewakili berbagai denominasi dan tingkatan gereja. Kedua, perlu dilakukan inovasi dalam struktur dan mekanisme APBD melalui pembuatan pos anggaran khusus yang lebih fleksibel, seperti "Dana Kemitraan Sosial-Keagamaan". Pos ini dirancang untuk mendanai program kolaboratif hasil rembuk forum, dengan prosedur administrasi yang disederhanakan namun tetap menjunjung tinggi akuntabilitas berbasis kinerja dan hasil (*outcome*). Ketiga, pemerintah harus mengembangkan Pedoman Teknis Kemitraan Pemerintah-Organisasi Keagamaan yang jelas. Pedoman ini akan mengatur standar operasional prosedur (SOP) untuk pengajuan proposal, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, sekaligus menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas administrasi gereja. Langkah-langkah kebijakan ini diharapkan dapat mentransformasi dukungan pemerintah dari bentuk bantuan yang bersifat karitatif dan insidental menjadi investasi strategis dalam pembangunan modal sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aldrin Purnomo and Yudhy Sanjaya.

- (2020). Tantangan Dan Strategi Gereja Menjalankan Misi Allah Dalam Menghadapi Penerapan Industri 4.0 Di Indonesia. *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika*, 3(2), 91–106.
- Bolung, B. J. (2023). Misi gereja dalam menghadapi tantangan global dan lokal. *Thronos: Jurnal Teologi Kristen*, 4(2), 193–201.
- Eddy Paimoen. (1999). *Kerajaan Allah dan Gereja*. Agiamedia.
- Erman Sepniagus Saragih. (2019). Fungsi Gereja Sebagai Entrepreneurship Sosial Dalam Masyarakat Majemuk. *Kurios*, 5(1), 12.
- Fadjar, A. M. (2005). *Negara Hukum*. Bayu Media.
- Faisal Ismail. (2014). *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*. Remaja Rosdakarya.
- Hasiholan, A. M., & Siahaan, H. E. R. (2024). Tipologi relasi gereja dan pemerintah menurut Philip J. Wogaman: Konstruksi teologi publik perspektif Pentakostal di Indonesia. *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 11(1), 64–78.
- Kaloh, J. (2003). *Kepala Daerah: Pola Perilaku, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- M. Irfan Riyadi dan Basuki. (2009). *Membangun Inklusivisme Paham Keagamaan*. STAIN Ponorogo Press.
- Mawa, W. O. (2020). Strategi Optimalisasi Kinerja Kepemimpinan Gereja Lokal. *Integritas: Jurnal Teologi* 2, 2(1), 77–94.
- Muhammad Qasim. (2020). Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan. In *Alauddin University Press*. Alauddin University Press.
- Ramona Vera Amiman. (2018). Penatalayanan Gereja Di Bidang Misi Sebagai Kontribusi Bagi

- Pelaksanaan Misi Gereja. *Missio Ecclesiae*, 7(2), 164–187.
- Ruhana, A. S. (2015). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Beragama di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 185–194.
- Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Viarel Elsievana Augesthine et al. (2022). Toleransi Beragama dan Sikap Bijak dalam Mewujudkan Digital Virtue. *Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 14(1), 1–13.
- Watofa, A. J. D., Marini, R. R., & Santoso, D. B. (2023). Analisis teologis implementasi manajemen dalam gereja. *SESAWI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 5(1), 200–215.
- Yakub B. Susabda, P. (1981). *Prinsip-Prinsip Pertimbangan Utama Administrasi Gereja*. Gandum Mas.
- Zainal Abidin Bagir et al. (2011). *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. CRCS UGM dan Mizan.